BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu upaya peningkatan pendidikan dilaksanakan melalui jenjang sekolah. Sekolah sebagai salah satu organisasi sektor publik di bidang pendidikan yang mempunyai peran penting dalam menghasilkan generasi yang berkualitas. Dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggungjawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Langkah awal pemerintah Indonesia dalam menangani masalah pemerataan pendidikan melalui pencanangan program wajib belajar 9 tahun, dimana 6 tahun untuk jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan 3 tahun untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar, yang tercantum dalam pasal 2 poin (a) menyatakan: meningkatkan akses bagi anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal/rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

Salah satu unsur penting dimiliki oleh suatu sekolah agar menjadi sekolah

yang dapat mencetak anak didik yang baik adalah dari segi keuangan. Manajemen keuangan sekolah sangat penting hubungannya dalam pelaksanaan kegiatan sekolah. Suatu sekolah memiliki sumber dana yang beragam baik dari pemerintah maupun pihak lain. Salah satu sumber dana sekolah yang ada saat ini yaitu dana Bantuan Opeasional Sekolah (BOS). Mekanisme pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) harus dilakukan secara efektif sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pengelolaan dana yang baik dan bebas korupsi dapat terlaksana dengan mengikuti prinsip *Good School Governance* (GSG) meliputi partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dari masing-masing sekolah sesuai Standar Nasional Pendidikan, pasal 27 ayat 2 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021. Pada dasarnya *Good School Governance* (GSG) merupakan istilah lain dari *Good Corporate Governance* (GCG) yang digunakan untuk instansi pendidikan khususnya sekolah.

Ditemukan beberapa penyelewengan dana BOS yang terjadi di tingkat nasional maupun daerah. Berdasarkan hasil kajian Indonesia *Corruption Watch* (ICW) yang dilakukan oleh Dewi Anggreni mengungkapkan negara mengalami kerugian sejumlah Rp.1,6 triliun dari Dana Operasional Sekolah (BOS) sepanjang tahun 2016-2022, (https://www.cnnindonesia.com). Data tersebut bertolak belakang dengan semangat reformasi di Indonesia yang menuntut terlaksananya prinsip *Good School Governance* (GSG).

Kasus penyelewengan dana BOS tingkat daerah khususnya di Bali dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 4.1
Daftar Kasus Penyelewengan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Bali Tahun 2015-2022

No.	Kabupaten	Kasus	Tahun	Keterangan
1.	Jembrana	SDN 1 Sangkaragung	2020	Oknum yang diduga melakukan penyelewengan BOS adalah Kepala Sekolah. Kepala Bidang Dinas Pendidikan menerangkan belum tahu secara pasti sanksi yang diberikan oleh Bupati terkait kasus tersebut. Inspektorat Jembrana sudah menghimbau disdik melakukan BAP dan hasilnya harus diserahkan ke Bupati.
2.	Klungkung	SMP N 1 Nusa Penida	2015	Kepsek dan Bendaharanya dalam pengadilan tipikor Denpasar dituntut pidana selama 4 Tahun dan 3,5 Tahun. Perbuatan terdakwa telah menghambat pembangunan dan tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi terutama dana BOS yang diperkirakan mencapai Rp. 683.765.882 sesuai hasil audit BPKP Perwakilan Bali.
3.	Denpasar	SDN 6 Pedungan	2016	Penyelewengan dana BOS oleh Kepala sekolah inisial IMS. Sehingga Inspektorat memberikan sanksi berupa pengembalian dana dalam waktu 60 hari dan diberi sanksi pengunduran diri akibat adanya mosi kepada walikota dari guru-guru.
4.	Tabanan	SMP Negeri 2 Tabanan.	2018	Laporan Dana BOS di awal 2018. Keterangan dari masyarakat yang menyebutkan dari kelas 7 sampai kelas 9 di minta sumbangan sukarela dengan jumlah beda-beda. Lapora tersebut masih dalam penyelidikan Kejari. Karena kepala sekolah yang dimintai keterangan mengaku tidak tahu tentang maslah tersebut karena baru 2 minggu menjabat sebagai kepala sekolah.

Sumber : Data diolah penulis (2022)

Dari tabel 1.1, menunjukkan bahwa dari empat kabupaten yang diberitakan adanya kasus penyelewengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS),

Kabupaten Tabanan sebagai salah satunya. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Tabanan masih memiliki kelemahan dalam tata kelola anggaran khususnya di bidang pendidikan. Kejadian tersebut tentu saja, dapat menimbulkan kerugian bagi pemerintah dan siswa sebagai objek penerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Besaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima tahun 2022 yaitu tingkat SD Rp. 930.000, tingkat SMP Rp.1.130.000, dan tingkat SMA Rp. 1.540.000 setiap siswa per tahun. Tahun 2022 Kabupaten Tabanan salah satu kabupaten yang menerima saluran dana BOS tahap pertama dari tiga kabupaten lainnya. Sesuai rincian Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu RI KPPN Denpasar pada 15 Februari 2022 (https://djpb.kemenkeu.go.id/) sebagi berikut:

Tabel 1.2
Daftar Penerimaan Dana BOS Tahap 1 Tahun 2022

Dana BOS	Jumlah Sekolah	Jumlah Siswa	Total Pagu	Total Nilai Penyaluran
Kabupaten Badung	309	76.446	93.612.940.000	28.083.882.000
Kabupaten Gianyar	322	66.383	73.679.980.000	22.103.694.000
Kabupaten Tabanan	336	50.473	59.872.050.000	17.961.615.000
Kota Denpasar	266	105.895	120.416.140.000	36.124.842.000

Sumber : Data diolah penulis (2022)

Tabel di atas menunjukkan bahwa Kabupaten Tabanan sebagai penerima dana BOS paling rendah dibandingkan tiga kabupaten lainnya. Dibandingkan dengan jumlah penerimaan tahun 2021, angka pada tabel tersebut lebih rendah karena jumlah diterima sebanyak Rp. 23.536.515.000 dan dari jumlah tersebut hanya dapat direalisasikan sebesar 96,69%. Sisanya menjadi SILPA anggaran tahun 2021.

Peneliti memilih Kabupaten Tabanan sebagai objek penelitian dengan pertimbangan, ditemukan kejadian kasus penyelewengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kabupaten Tabanan dari tiga kabupaten lainnya sepanjang tahun 2015 sampai saat ini seperti yang tercantum dalam table 1.1 dan sebagai penerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahap I tahun 2022 seperti table 1.2 yang lebih rendah dibandingkan pagu dari tiga kabupaten lainnya dimana jumlah tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan pagu yang diterima tahun 2021. Sehingga dari kedua pertimbangan tersebut, dapat diketahui bahwa kurangnya penerapan prinsip pengelolaan anggaran secara efektif dan efisien dapat memicu timbulnya kasus penyelewengan dan menurunkan minat pelajar untuk sekolah di SMP Kabupaten Tabanan yang memberikan pengaruh terhadap penurunan pagu Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Fokus penelitian ini yaitu pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) se-Kabupaten Tabanan sebanyak 39 sekolah. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan, ditemukan adanya beberapa permasalahan terkait pengelolaan dana BOS sesuai tabel berikut:

Tabel 1.3
Permasalahan pengelolaan dana BOS pada SMP di Kabupaten Tabanan Tahun 2018-2022

No	Fokus Permasalahan	Uraian Masalah
1.	Keterbatasan SDM	Pengelolaan dana BOS pada SMP di Kabupaten Tabanan dikelola oleh satu orang bendahara di setiap sekolah. Banyaknya jenis kegiatan dalam anggaran dana BOS menimbulkan beban kerja yang tinggi bagi seorang bendahara, sehingga tidak mampu dikerjakan secara maksimal oleh bendahara dan melibatkan staff guru lainnya walau tidak memiliki pengalaman atau kompetansi dalam

		pengelolaan dana BOS.
2.	Keterlambatan pelaporan dana BOS ke Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan.	Dalam pengelolaan dana BOS ditetapkan target pelaporan anggaran sesuai dengan jadwal. Namun pada kenyataannya sering mengalami keterlambatan akibat gangguan jaringan saat pengiriman laporan secara *online*. Bahkan kadang-kadang terjadi ketidakcocokan pelaporan saat laporan sampai kepada tim pemeriksa akibat perubahan bulan.
3.	Kesalahan input dalam aplikasi keuangan sekolah	Sebuah anggaran memiliki jenis belanja yang berbeda-beda sesuai dengan jenis kegiatan. Karena keterbatasan atau tingginya beban kerja petugas penginput anggaran menyebabkan kelalaian dalam penginputan pada pintu belanja yang telah ditentukan. Sehingga ditemukan ketimpangan antara rencana anggaran dengan realisasi.
4.	Ketidak sesuaian pelaporan dana dan realisasi	Adanya kelalaian dari bendahara selaku pengelola dan BOS maupun keterikatan antara kebijakan internal sekolah yang menjadikan munculnya pengadaan barang atau belanja yang tidak sesuai antara pertanggungjawaban dan realisasi di lapangan atau sekolah.
5.	Rendahnya pengawasan keuangan dari pihak internal dan eksternal sekolah.	Kesesuaian sistem pengelolaan keuangan dapat terlaksana apabila dilakukan pengawasan dan pengendalian secara berkesinambungan baik oleh pihak internal maupaun pihak eksternal selaku pemberi kebijakan atau pemangku kepentingan. Namun, pada kenyataannya tidak semua sekolah di Kabupaten Tabanan melaksanakan atau mendapatkan pembinaan dari atasan maupun pemaparan kepada pemangku kepentingan secara berkesinambungan.

Sumber: Data diolah penulis (2022)

Dalam tabel permasalahan yang telah disajikan, ditemukan beberapa permasalahan dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMP di Kabupaten Tabanan. Bila dikaitkan dengan keilmuan akuntansi, permasalahan dari pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

khususnya disebabkan oleh terbatasnya kemampuan pengelola atau bendahara dapat dikatakan belum selaras.

Berdasarkan fenomena dan permasalahan yang ditemukan terkait dengan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terutama dengan penerapan prinsip *Good School Governance (GSG),* dapat digambarkan dari beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Nurjana (2017) memberikan gambaran bahwa *Good School Governanve (GSG)* merupakan faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Penelitian serupa juga dilakukan oleh Susanti, (2019), Sinaga, (2020), serta Ningsih & Siwi, (2019).

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerapan Prinsip *Good School Governance (GSG)* dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam organisasi sekolah, misalnya kepala sekolah, bendahara, dan operator. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar organisasi sekolah, misalnya orang tua siswa, dewan komite, pemerintah, dan pihak lain yang berasal dari luar sekolah Ismara,dkk (2019).

Beberapa faktor penting yang perlu dipertimbangkan oleh sekolah agar terlaksananya prinsip *Good School Governance (GSG)* dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah saat ini adalah tingkat pendidikan pengelola keuangan, transformasi digital, dan *budget emphasis.* Pada lembaga pendidikan formal seperti sekolah, semakin tinggi tingkat pendidikan pegawai atau karyawan maka semakin baik pula tingkat keterampilan (*skill*) yang dimiliki sehingga dapat memberikan pelayanan yang maksimal dalam pengelolaan manajemen sekolah

Sutrisna,dkk (2017). Hasil penelitian menyatakan bahwa tingkat pendidikan pengelola keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektifitas pengelolaan keuangan yang mencakup transparansi dan akuntabilitas. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian lain tentang variabel tingkat pendidikan oleh Nugroho,dkk (2019), Noholo, (2021), Sinaga, (2020), Wardani,dkk (2017), dan Muzahid, (2014). Berbeda dari beberapa penelitian sebelumnya, penelitian yang dilakukan Wungow,dkk (2016) menyatakan tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap pemahaman laporan keuangan sektor publik.

Keberhasilan penerapan prinsip *Good School Governance (GSG)* dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), tidak terlepas dari pengaruh modernisasi pelaporan keuangan dengan sistem komputerisasi (transformasi digital). Transformasi digital merupakan perubahan yang terjadi secara bertahap dan berkesinambungan dari manual ke sistem komputerisasi melalui aplikasi, *web* dan situs lainnya yang didukung oleh kemajuan teknologi. Penelitian yang dilakukan oleh Afifah,(2019) menjelaskan bahwa kecanggihan teknologi informasi secara simultan mampu menjelaskan kualitas laporan akuntansi yang mencakup karakteristik relevansi, dapat diuji, dapat diverifikasi, ketepatan waktu dan dapat dipahami. Hasil penelitian ini, sejalan dengan penelitian Sinaga (2020) yang melakukan penelitian mengenai variabel digitalisasi yang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *Good School Governance (GSG).* Dua penelitian sebelumnya sejalan pula dengan penelitian Pancawati, (2021), dan Adrianti, (2018). Berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardani, (2017) menjelaskan bahwa teknologi informasi tidak memberikan pengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah desa.

Selain itu, faktor lain yang diindikasikan mempengaruhi penerapan *Good School Governance (GSG)* adalah *Budget Emphasis. Budget Emphasis* merupakan kondisi saat anggaran dijadikan faktor yang paling dominan untuk pengukuran kinerja bawahan dalam suatu organisai. Penelitian mengenai variabel *Budget Emphasis* sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh Tetriani, (2019) dalam penelitiannya menjelaskan *budget emphasis* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *slack* anggaran baik secara parsial maupun secara simultan. Salah satu penyebab munculnya *Slack* anggaran adalah motivasi bawahan untuk mendapatkan *reward,* keinginan untuk mendapatkan *reward* dari atasan memicu bawahan untuk memberikan informasi yang bias agar anggaran mudah dicapai. Penyajian informasi yang bias dari bawahan merupakan salah satu bentuk tidak terlaksananya Prinsip *Good School Governance (GSG)* dalam suatu organisai utamanya sekolah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Umasangadji, (2019) yang menyatakan *Budget Emphasis* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Budgetary Slack* pada sektor publik. Penelitian lain yang sejalan dan berkaitan dengan variabel *Budget Emphasis* juga pernah dilakukan oleh Kusniawati & Lahaya, (2018), Fadhli (2019) dan Firdaus, (2017). Berbeda dengan dua penelitian sebelumnya terkait variabel *Budget Emphasis,* penelitian dari Avrianti, (2021) menyatakan *Budget emphasis* tidak berpengaruh terhadap kesenjangan anggaran.

Berdasarkan pemaparan dari paragraf di atas dapat dikaitkan dengan teori *Stakeholder*. Teori *Stakeholder* adalah konsep yang menjelaskan bahwa sekelompok orang atau individu yang diidentifikasikan dapat mempengaruhi dan dapat dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu. Suatu organisasi tidak

hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun harus memberikan manfaat kepada seluruh *stakeholder*-nya. Organisasi yang dibahas dalam penlitian ini merupakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang dipengaruhi oleh anggaran dan dukungan *stakeholder*-nya yang mempengaruhi kualitas pendidikan.

Penelitian ini terinspirasi dari penelitian yang dilakukan oleh Sutrisna, dkk (2017) mengenai Pendidikan Pengelola Keuangan, Pengendalian Intern Akuntansi, Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Sekolah (Studi Empiris Pada SMA/SMK Negeri di Kabupaten Buleleng). Penelitian Sutrisna, dkk (2017) ini berfokus pada penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai bagian dari prinsip *Good School Governance (GSG).* Penelitian yang akan dilakukan ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu pada variabel *independen* yakni transformasi digital dan *budget emphasis* serta variabel *dependen* berupa penerapan prinsip *Good School Governance (GSG).* Sedangkan variabel tingkat pendidikan masih sangat jarang diteliti, sehingga menarik diteliti lebih lanjut untuk mengetahui pengaruhnya terhadap penerapan prinsip *Good School Governance (GSG)* dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Merujuk pada pemaparan penelitian terdahulu terkait variabel tingkat pendidikan ditemukan adanya *research gap* pada penelitian satu dengan penelitian lainnya. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Sutrisna, dkk (2017) ditemukan bahwa tingkat pendidikan pengelola keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sebagai bagian dari prinsip *Good School Governance (GSG).* Begitu juga penelitian yang

dilakukan oleh Muzahid (2014) tentang tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Namun berbeda dengan penelitian Wungow,dkk (2016) yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap pemahaman laporan keuangan sektor publik.

Sehingga dengan memperhatikan fenomena, permasalahan dan penelitian terdahulu yang relevan sesuai uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Pengaruh Tingkat Pendidikan Pengelola Keuangan, Transformasi Digital, dan *Budget Emphasis* Terhadap Penerapan Prinsip *Good School Governance (GSG)* dalam Pengelolaan Dana BOS".**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat diidentifikasi masalah yang muncul sebagai berikut:

1.2.1 Penyimpangan terhadap pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di sekolah masih sering terjadi, sehingga menyebabkan kerugian negara.

1.2.2 Pengelola keuangan mengalami kendala dalam mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) karena adanya pekerjaan ganda, seperti guru merangkap menjadi administrasi.

1.2.3 Ketidakmampuan pengelola keuangan dalam memanfaatkan teknologi yang ada saat ini dalam pengelolaan dana sekolah khususnya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) .

1.2.4 Penyampaian laporan keuangan kepada pihak yang berkepentingan tidak dilakukan secara maksimal dan transparan.

1.3 Pembatasan Masalah

Pada penelitian ini, penulis memberikan fokus penelitian pada Pengaruh Tingkat Pendidikan Pengelola Keuangan, Transformasi Digital dan *Budget Emphasis* Terhadap Penerapan Prinsip *Good School Governance (GSG)* dalam Pengelolaan Dana BOS pada SMP di Kabupaten Tabanan Tahun 2022.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1.4.1 Apakah tingkat pendidikan pengelola keuangan memiliki pengaruh terhadap penerapan prinsip *Good School Governance (GSG)* ?

1.4.2 Apakah transformasi digital memiliki pengaruh terhadap penerapan prinsip *Good School Governance (GSG)* ?

1.4.3 Apakah *budget emphasis* memiliki pengaruh terhadap penerapan prinsip *Good School Governance (GSG)* ?

1.5 Tujuan Penelitian

Mengacu pada permasalahan yang diajukan dalam penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1.5.1 Untuk mengetahui pengaruh pendidikan pengelola keuangan terhadap penerapan prinsip *Good School Governance (GSG).*

1.5.2 Untuk mengetahui pengaruh transformasi digital terhadap penerapan prinsip *Good School Governance (GSG).*

1.5.3 Untuk mengetahui pengaruh *budget emphasis* terhadap penerapan prinsip *Good School Governance (GSG).*

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan refrensi tambahan dalam ilmu pengetahuan secara teoritis, yakni turut berkontribsi dalam pengembangan teori *stakeholder* secara umum maupun sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dalam mata kuliah di Jurusan Akuntansi dan Ekonomi. Dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak dapat terlepas dari dukungan *stakeholder*-nya sebagai pendukung dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan diharapkan sekolah mampu melaksanakan prinsip *Good School Governance (GSG)* sehingga *stakeholder* sebagai penerima atau pemakai yang merasakan manfaat langsung dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) itu sendiri memahami dengan baik tentang dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Selain itu, penelitian ini diharpkan dapat berkontribusi dalam pengembangan keilmuan akuntansi, khususnya dalam akuntansi sektor publik dan konsitensi dari variabel-variabal yang dapat mempengaruhi penerapan prinsip *Good School Governance (GSG).*

1.6.2 Manfaat Praktis

1.6.2.1 Bagi Sekolah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada manajemen sekolah terkaiat dengan pengaruh tingkat pendidikan pengelola keuangan, transformasi digital, dan *budget emphasis* terhadap penerapan prinsip *Good School Governance (SGS)* dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Secara sederhana dapat dijelaskan, manajemen sekolah yang hendak menerapkan prinsip *Good School Governance (GSG)* dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebaiknya memperhatikan faktor-faktor tersebut.

1.6.2.2 Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan informasi sebagai bahan evalusi bagi pemerintah mengenai sejauh mana kontribusi sekolah-sekolah SMP yang ada di Kabupaten Tabanan menerapkan prinsip *Good School Governance (GSG)* dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan penerapan prinsip *Good School Governance (GSG)*

1.6.2.3 Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan gambaran mengenai penerapan prinsip *Good School Governance (GSG)* pada sekolah-sekolah SMP di Kabupaten Tabanan.

1.6.2.4 Bagi Penulis

Setelah melakukan penelitian ini diharapkan penulis mampu mengetahui apa saja faktor yang mendukung dari terlaksananya prinsip *Good School Governance*

(GSG) pada SMP di Kabupaten Tabanan, terutama dalam hal tingkat pendidikan, transformasi digital dan *budget emphasis*. Serta mampu mengembangkan variabel lain yang sejenis pada penelitian lainnya.

1.6.2.5 Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Penelitian yang dilakukan diharapkan menambah sumber referensi keperpustakaan Undiksha serta menambah sumber referensi bagi para peneliti kedepannya. Memberikan kontribusi ilmiah dan tambahan kajian empiris berkenaan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan prinsip *Good School Governance (GSG).*